

PENGARUH KESENJANGAN DIGITAL TERHADAP PEMBANGUNAN PEDESAAN (*RURAL DEVELOPMENT*)

EFFECT OF DIGITAL DIVIDE ON RURAL DEVELOPMENT (RURAL DEVELOPMENT)

Robby Darwis Nasution

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

darwisnasution69@gmail.com

(Diterima: 30 April 2016; Direvisi: 10 Juni 2016; Disetujui terbit: 27 Juni 2016)

Abstrak

Masuknya era globalisasi ditandai dengan keterbukaan akses informasi dan transfer teknologi dari negara maju kepada negara sedang berkembang seperti Indonesia. Tidak selamanya globalisasi membawa dampak yang baik bagi negara Indonesia karena luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari gugusan pulau yang menyebabkan tidak terjadinya pemerataan baik terhadap akses informasi maupun dalam pembangunan. Akses teknologi informasi di Indonesia masih mengalami kesenjangan dimana pengguna internet masih didominasi di pulau-pulau pusat pemerintahan seperti Jawa dan Bali. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan digital antara pulau Jawa dan pulau-pulau di wilayah timur Indonesia. Selain itu, kesenjangan digital juga terjadi tidak hanya antar pulau, tetapi juga antara pusat kota dan wilayah pinggiran yang mengakibatkan tidak bisa terjadi pemerataan pembangunan di Indonesia. Selain karena kesenjangan digital yang terjadi, pembangunan di wilayah pedesaan (*rural development*) juga terkendala dengan adanya aturan-aturan adat yang mengikat suatu desa serta budaya-budaya tradisional yang menolak diterimanya paham-paham atau teknologi-teknologi baru hasil dari globalisasi. Untuk menghindari ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, tentunya harus dilakukan perubahan paradigma pembangunan pedesaan yang menggabungkan antara kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan kearifan lokal di mana keduanya akan saling menguatkan satu sama lain. Teknologi informasi dan komunikasi akan membuka akses pengetahuan dan kerjasama baik dengan wilayah lain ataupun dari negara lain, sedangkan kearifan lokal akan berfungsi sebagai ciri dari desa tersebut dengan desa yang lain atau bisa dikatakan sebagai corak alamiah dari suatu desa.

Kata Kunci : teknologi informasi, *rural development*, kesenjangan digital, globalisasi.

Abstract

The entry of the era of globalization is characterized by openness access to information and technology transfer from developed countries to under developing countries like Indonesia. Not forever globalization brings good impact for Indonesia because of the vast territory of Indonesia which consists of a group of islands that lead no good equalization of access to information as well as in development. Access to information technology in Indonesia is still experiencing gaps where Internet users are still predominant in the central islands such as Java and Bali government. This resulted in the digital divide between the islands of Java and the islands in eastern Indonesia. In addition, the digital divide also occurs not only between the islands, but also between the city center and suburban areas that lead to equitable development can not take place in Indonesia. In addition to the digital divide that happens, the development in rural areas is also constrained by the bind rules of customary a village and traditional cultures that refuse acceptance of ideologies or new technologies result from globalization. To avoid imbalance development between urban and rural areas, must be carried out changes in rural development paradigm that combines the advancement of information technology and communication with local knowledge where the two will be mutually corroborate another one. Information and communications technology will open up access to knowledge and good cooperation with other regions or from other countries, while the local wisdom will be a function as a hallmark of the village to another village or can be regarded as a natural pattern of a village.

Keywords: information technology, digital discrepancy, rural development, globalization

PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dimasa sekarang ini telah perlahan mengubah wajah dunia dari jaman konvensional kearah pengembangan berbasis IT (internet). Di dalam perubahan ini tentunya akan mengubah arah beberapa aspek kehidupan khususnya di Indonesia, dimana aspek sosial kemasyarakatan, ekonomi, dan juga pendidikan akan menyesuaikan dengan perubahan tersebut. (Nasution 2015) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini adalah salah satu pertanda masuknya era baru bagi dunia yaitu era globalisasi. Di dalam era ini, sebuah negara dituntut untuk lebih terbuka terhadap informasi atau modernisasi yang berasal dari asing jika tidak menginginkan negaranya terasing dari pergulatan perdagangan bebas.

Penyebab utama terjadinya era globalisasi ini adalah karena pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang membuat kehidupan manusia lebih mudah dan efisien. Penggabungan antara teknologi komputer dan telekomunikasi pada era globalisasi ini telah menghasilkan suatu revolusi dibidang sistem informasi seperti halnya *e-commerce*, EDI, dan sebagainya sehingga sekarang telah menerobos batas-batas fisik antar negara. (Simarmata 2005) Revolusi sistem informasi ini menjadi wajib bagi seluruh negara di dunia sehingga setiap negara harus meninggalkan sistem informasi konvensional menjadi berbasis internet. Internet sekarang juga sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia dimasa modern seperti sekarang ini karena merupakan syarat utama dalam melaksanakan pembangunan.

Dalam dua dekade ini, terhitung sejak fase awal perkembangan internet di Indonesia tahun 1990-an, jumlah pengguna

internet meningkat dengan amat pesat. Hal ini terjadi beriringan pula dengan ekspansi kelas menengah, pertumbuhan ekonomi negara, dan proses demokratisasi. Namun, peningkatan ini tidak dibarengi dengan pemerataan pengguna internet di Indonesia secara geografis. Menurut riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), dan didukung banyak sumber lainnya menyatakan bahwa penggunaan internet terbesar di Indonesia didominasi di wilayah Barat, yaitu khususnya di pulau Jawa. (Marius and Supto 2015, v) Hal ini mengakibatkan sebaran akses informasi dan komunikasi tidak bisa merata atau dirasa sangat lambat untuk bisa terjangkau di wilayah-wilayah pinggiran seperti wilayah timur Indonesia.

Di masa sekarang ini, kebanyakan masyarakat Indonesia tidak lagi dapat melepaskan diri dari kegiatan komunikasi berbasis internet. Sejak pemerintah Indonesia mengembangkan infrastruktur internet pada tahun 1980-an, jumlah pengguna internet terus meningkat, hingga tahun 2013 terdapat 71.19 juta pengguna internet di Indonesia. Dengan jumlah tersebut, penetrasi internet di Indonesia tahun 2013 adalah sebesar 28%, walaupun angka penetrasi terus mengalami peningkatan, namun pengguna internet di Indonesia tidak merata secara geografis. Pengguna internet di Indonesia paling banyak ada di Indonesia bagian Barat, yakni di pulau Jawa (terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya), Bali dan Sumatera. Menurut hasil survey APJII mayoritas pengguna internet di Indonesia hidup di wilayah barat Indonesia, khususnya pulau Jawa. (Marius and Supto 2015, 2) ketimpangan digital ini selanjutnya menjadi penentu utama pemerintah dalam melaksanakan pemerataan pembangunan di Indonesia

yang semula hanya bisa dinikmati oleh wilayah-wilayah pusat pemerintahan.

Gambaran ketimpangan digital diatas juga merefleksikan ketidakmerataan kesejahteraan warga negara di Indonesia secara keseluruhan baik di wilayah pusat pemerintahan maupun di wilayah pinggiran (*rural*). Upaya pemerataan akses internet sedang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui program Pita Lebar 2014-2019. Perhatian perlu ditujukan pula pada pengetahuan bahwa pembangunan infrastruktur internet bukan hanya menyangkut hak atas akses informasi, tapi juga berkaitan erat dengan pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan, dan pemberdayaan komunitas tertinggal. Perencanaan program pembangunan ataupun pengembangan bisnis yang tepat sasaran perlu didukung oleh data empirik. (Marius and Sapto 2015, v) Dengan melihat latar belakang diatas maka sangat menarik sekali jika kita menelaah lebih jauh bagaimana pengaruh kesenjangan digital di Indonesia terhadap perubahan paradigma pembangunan di wilayah pinggiran /pedesaan (*rural development*).

Masuknya Era Globalisasi

Globalisasi merupakan isu penting yang muncul dalam beberapa dekade yang lalu, dimana era ini ditandai dengan semakin majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Globalisasi sendiri merupakan konsep yang berkaitan dengan internasionalisasi, universalisasi, liberalisasi, dan westernisasi. Selain itu, globalisasi menyebabkan terjadinya kompleksitas isu dan nilai yang menyebar dan menjadi universal (Battersby and Siracusa 2009, 59) Di dalam tiga kelompok besar globalisasi, kelompok *hiperglobalis* mendefinisikan globalisasi sebagai sejarah baru kehidupan manusia dimana negara tradisional telah menjadi

tidak relevan lagi dan mulai berubah menjadi menjadi unit-unit bisnis dalam sebuah ekonomi global. (Winarno 2007, 11) Dengan berubahnya negara tradisional menjadi unit-unit bisnis ini, maka perubahan arah kebijakan yang diambil sebuah negara akan lebih banyak kepada efisiensi dan orientasi ekonomi.

Tapi kenyataannya, globalisasi tidak sepenuhnya berupa fenomena ekonomi, tetapi juga termasuk didalamnya fenomena politik serta fenomena budaya. Globalisasi berawal dari internasionalisasi pasar tradisional menjadi pembangunan model baru yang lebih menekankan kepada perdagangan, teknologi, dan pertukaran kebudayaan. (Hoffman 2007, 63) Selain itu, ada tiga faktor yang saling berkoindeksi dalam menopang globalisasi ekonomi dan perdagangan dunia dewasa ini, yakni revolusi di bidang teknologi komunikasi, semakin rendahnya biaya transportasi dan munculnya ideologi liberal. (Winarno 2007, 20)

Pada sisi lain, globalisasi adalah sebuah fenomena yang melibatkan proses-proses sosial integrasi ekonomi, budaya, kebijakan-kebijakan negara, dan pergerakan politik di seluruh dunia. Menurut Appadurai (2006), globalisasi merujuk pada keseluruhan proses-proses sosial yang melibatkan perpindahan orang, komoditas (barang), kapital, pengetahuan, pemikiran, informasi, dari satu negara ke negara lain. Kajian mengenai *global village* tidak dapat dipisahkan dari globalisasi. Konsep *global village* dalam terminologi studi globalisasi seringkali disebut sebagai *globality*. Globalisasi tidak hanya terbatas melalui media tetapi proses-proses politik dan ekonomi, serta berkaitan dengan relasi dominasi dan hegemoni. Sementara *globality* atau *global village* merujuk pada fenomena global saling

ketergantungan yang merupakan hasil dari proses globalisasi. (Appadurai 2006) *Global village* merupakan bentukan dari globalisasi dan akibat yang ditimbulkan dari apa yang dilakukan manusia di era globalisasi ini yaitu manusia yang lebih condong berorientasi dengan kehidupan digital. Orientasi inilah yang selanjutnya yang mendorong terbentuknya komunitas-komunitas digital (yang tidak bertatap muka secara langsung) dan disebut juga dengan *global village*.

Konsep globalisasi telah menghasilkan apa yang McLuhan prediksi tentang *global village* yang unsur-unsur pembentuknya saling berhubungan namun demikian, anggota-anggota dari desa besar ini tidaklah bersifat terhubung (*connected*) secara homogen. (Walkosz, Jolls and Sund 2008) Lingkungan media global mengizinkan audiensnya berbagi beberapa hal yang sama seperti program-program TV, keinginan terhadap produk yang sama, dan hal-hal yang diiklankan oleh media. Konglomerasi media global yang bersifat komersial ini menyediakan akses terhadap program tv, film, video, dan lain-lain sehingga dikhawatirkan memunculkan imperialisme budaya dan menghasilkan kultur dominan. Generasi muda cenderung lebih percaya dan tergantung pada *platform* media daripada bimbingan orang tua mereka. Proses globalisasi dan lokalisasi menghasilkan *output* yang unik di daerah-daerah tertentu seperti telah disebutkan di muka menjadi relevan dalam hal ini. Globalisasi adalah sebuah proses di mana korporasi-korporasi global memproduksi dan memasarkan produknya dalam lingkungan tertentu di tingkat lokal untuk memenuhi variasi permintaan konsumen. Konsep ini juga merupakan kerangka untuk menganalisis cara-cara dimana aktor aktor sosial mengkonstruksi

makna, identitas, dan bentuk bentuk kelembagaan di dalam konteks sosiologis globalisasi. (Pamungkas 2015, 256) Secara tidak langsung, pola-pola perilaku yang ditimbulkan dari efek munculnya globalisasi telah merubah pola perilaku masyarakat yang semakin mengesampingkan norma-norma sosial dan berubah arah menjadi norma-norma digital.

Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari efek masuknya globalisasi, sangat terasa sekali di dalam kehidupan sehari-hari di mana segala aktifitas manusia sekarang bisa dilakukan melalui media digital seperti contoh berbelanja, pesat hotel atau tiket kereta api, pesan makanan dan lain sebagainya. Perubahan perilaku manusia yang tercipta akibat perubahan perkembangan jaman ini tentu saja membawa dampak baik dampak positif maupun negatif bagi kehidupan manusia.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki manfaat dan efek yang mempengaruhi cara kerjanya komunikasi dan teknologi itu sendiri. Teknologi informasi dan komunikasi terutama komputer telah banyak dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan misalnya di bidang pendidikan, industri, kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Sekarang kita akan membahas tentang dampak yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, tentu saja dampak yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Seperti yang kita ketahui perkembangan teknologi komunikasi dan informasi pada jaman sekarang sangatlah pesat, seperti

yang kita ketahui di kota dengan mudah orang-orang dapat mengakses internet atau informasi di mana saja dan kapan saja tanpa ada batas usia dari yang muda hingga yang tua, berbeda dengan orang-orang yang tinggalnya di pedesaan, orang-orang yang ditinggal di pedesaan sangat susah untuk dapat mengakses internet atau sebuah informasi, jika mereka ingin mengakses atau mendapatkan sebuah informasi mereka harus keluar dari desa mereka seperti ke kota maka terjadilah kesenjangan sosial antara yang dikota dengan yang didesa. (Mareta 2014)

Adapun dampak positif yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi adalah selain mudah untuk mengakses informasi yang kita butuhkan, kita dapat dengan mudah mencari lowongan pekerjaan, karena pada jaman sekarang banyak sekali perusahaan yang memasang iklan lowongan pekerjaan di web dan dapat diakses oleh semua orang tanpa batasan, pada jaman sekarang orang-orang dapat bekerja dirumah saja tanpa harus pergi ke kantor karena mereka dapat bekerja secara online yang biasanya disebut dengan *freelance online* dan bagi para mereka pengusaha rumahan, mereka dapat menawarkan atau menjual produk atau barang mereka secara online dan para pembeli dapat memesan dan membelinya secara *online*. Dampak positif terhadap bidang komunikasi adalah semua orang dapat berkomunikasi dengan lancar dan cepat tanpa terhalang oleh waktu dan jarak jauh, yang pada jaman dulu sangat mengganggu seseorang jika ingin berkomunikasi dengan orang lain dan penyebaran informasi dengan mudah dan kita juga dapat dengan mudah mengirimkan informasi atau bertukar informasi, kita juga bisa mendapatkan banyak teman akibat perkembangan

teknologi komunikasi dan informasi, bisa melalui jejaringan sosial atau media sosial. (Mareta 2014)

Selain itu, terdapat dampak positif lain yaitu terkait dengan dampak teknologi informasi terhadap budaya. Dampak positif perkembangan teknologi komunikasi dan informasi terhadap budaya adalah kita dapat dengan mudah mengetahui dan mempelajari budaya-budaya asing yang ada di dunia. Dampak positif dalam bidang pendidikan adalah banyak munculnya web-web yang berisi tentang informasi pendidikan dan ilmu pengetahuan sehingga semua murid atau mahasiswa bisa belajar tidak hanya di buku saja tetapi juga bisa belajar melalui internet. Munculnya metode belajar yang baru, karena murid atau mahasiswa tidak lagi harus memperhatikan papan tulis karena guru atau dosen pada jaman sekarang bisa menjelaskan materi pembelajaran mereka melalui power point dan mahasiswa tinggal mencatat apa yang penting yang disampaikan oleh dosen atau guru. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka, karena proses belajar pada jaman sekarang dengan melihat sebuah video atau rekaman suara dari sebuah file saja kita bisa mendapatkan pelajaran penting yang disampaikan, itu merupakan beberapa dampak positif dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. (Mareta 2014)

Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi adalah dengan banyaknya yang bisa memasang iklan lowongan pekerjaan di internet atau sebuah web, maka dampak negatifnya adalah iklan tersebut bisa saja merupakan sebuah iklan penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang iseng atau orang-orang yang ingin berbuat kriminal terhadap orang lain dan

soal bekerja secara *online* bisa saja orang yang sudah melakukan pekerjaannya dengan baik, tidak dibayar sesuai dengan pekerjaan yang sudah ia kerjakan. Dampak negatif dalam bidang komunikasi adalah dengan banyaknya muncul media sosial atau disebut dengan jejaring sosial seseorang dapat memanfaatkannya sebagai bentuk kriminal misalnya seseorang mengajak bertemu dengan orang yang baru saja ia kenal melalui salah satu jejaring sosial dan setelah bertemu orang tersebut berkejahatan terhadap orang itu misalnya merampok atau memperkosa orang tersebut. (Mareta 2014)

Selain itu, juga terdapat dampak negatif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya di mana dengan mudah budaya asing masuk ke dalam suatu negara, misalnya budaya barat dan budaya korea yang masuk ke Indonesia, akibatnya masyarakat Indonesia lebih senang dengan budaya barat atau korea itu sendiri dan mulai meninggalkan budaya asli mereka atau budaya asli Indonesia. Dampak negatif terhadap manusianya sendiri adalah orang-orang pada jaman sekarang lebih banyak sibuk dengan *handphonenya* masing-masing sehingga menjadi makhluk individual bukan makhluk sosial, lebih senang sibuk sendiri daripada berkumpul dengan teman-temannya, karena perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat manusia menjadi malas karena hampir semua kegiatan pada jaman sekarang bisa dilakukan di rumah. Dan jika ingin membicarakan sesuatu bisa melalui jejaring sosial tanpa harus bertemu tatap muka dengan orang yang akan kita ajak berbicara. Dan bisa juga membuat seseorang tidak berpikir kreatif karena mereka bisa mencontek ide seseorang dengan mudah. Dampak negatif dalam

bidang pendidikan murid atau mahasiswa bisa dengan mudah *copy paste* sesuatu sehingga seorang murid atau mahasiswa menjadi tidak kreatif dan tidak menciptakan sesuatu yang baru atau juga bisa terjadi plagiarisme suatu karya seseorang. Dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi seseorang bisa saja saling menghujat satu dengan lainnya di media sosial, seseorang tidak memiliki privasinya sendiri dan lain-lainnya. (Mareta 2014)

Dampak-dampak yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi nyatanya telah menyatukan dunia dengan membuat para penggunanya dari seluruh dunia dapat berhubungan dengan yang lain dengan adanya internet, manusia dapat berkomunikasi dengan orang lain secara bebas tanpa dibatasi jarak dan waktu sehingga sering kita dengar istilah "*distance is dead*". Dampak positif yang muncul dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang sosial adalah manusia dapat tetap saling berkomunikasi satu sama lain melalui media sosial yang terhubung dengan media internet. Sebagai contoh melalui media sosial, manusia masih dapat berkomunikasi dengan melakukan *chatting*, baik dalam jarak yang dekat maupun jarak yang jauh. Dampak buruk atau negatifnya adalah apabila manusia tidak bisa menggunakan teknologi itu secara bijak akan menjadi bahaya apabila manusia menjadi tergantung kepada teknologi tersebut. Fragmentasi sosial itu sendiri merupakan terjadinya perpecahan dalam masyarakat sehingga individu menjadi semakin terasing dan ikatan sosial juga menjadi semakin lemah. (Hartanto 2014)

Dalam bidang politik, teknologi komunikasi dan informasi juga sangat diperlukan agar suatu program dan ide bisa

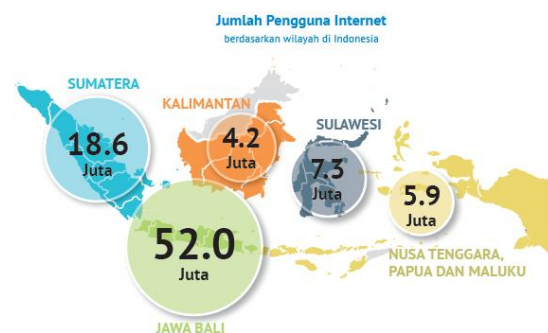
berjalan dengan baik dan diketahui oleh seluruh anggota masyarakat. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak yaitu informasi sosialisasi nilai-nilai politik tersebar luas secara merata. Selain memberikan informasi mengenai persoalan politik, media komunikasi juga akan menyampaikan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Media berperan sebagai mediator antara pemerintah dengan rakyat sehingga rakyat bisa mengutarakan pendapatnya dan bisa memberi masukan untuk membangun negara yang lebih baik. Oleh karena itu, teknologi informasi dan komunikasi juga berperan aktif dalam mendukung perkembangan politik suatu Negara. (Hartanto 2014)

Kesenjangan Digital di Indonesia

Direktur Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo Mariam F Barata menyatakan bahwa, sampai tahun 2015 baru terdapat 74 juta pengguna internet di Indonesia atau setara dengan 29 persen dari total penduduk dan itupun kebanyakan masih berada di wilayah perkotaan. Di Indonesia sendiri masih terjadi kesenjangan digital di tingkat masyarakat padahal internet menjadi salah satu pintu masuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu melalui penyebaran informasi dan ilmu pengetahuan. (kominfo 2015) Dengan masih adanya kesenjangan digital ini tentu penyebar luasan informasi dan komunikasi dari pusat pemerintahan kepada seluruh penjuru negeri ini tentu tidak bisa merata. Di daerah-daerah yang sudah terjangkau akses internet maka informasi dan komunikasi dari pusat bisa dilakukan dengan menggunakan jalan tersebut, sedangkan wilayah-wilayah yang belum terjangkau akses internet maka penyebaran

informasi dan komunikasi dilakukan secara manual yaitu via pos. Dua hal yang berbeda ini memiliki permasalahan yang mendasar yaitu waktu penyampaian pesan yang berbeda dimana yang melalui internet langsung bisa diakses seketika itu juga, tetapi yang melalui Pos tentu harus menunggu beberapa hari untuk bisa diakses.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 88 juta orang hingga akhir tahun 2014. Berdasarkan populasi ini, jumlah pengguna Internet terbanyak adalah di Provinsi Jawa Barat sebanyak 16.4 juta, diikuti oleh Jawa Timur 12.1 juta pengguna dan Jawa Tengah 10.7 juta pengguna. (Marius and Sapto 2015, 20) Selain itu, Pengguna internet jika dibedakan setiap pulau maka pulau Jawa memiliki nilai tertinggi penduduk pengguna internet di Indonesia sedangkan penduduk dengan pengguna internet terendah berada di pulau Kalimantan Setelah itu pulau Maluku dan Irian Jaya.



Gambar 1. Peta Pengguna Internet Berdasarkan Pulau Di Indonesia Berdasarkan Survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2014

Dari grafik di atas tentu kita bisa melihat seberapa jauh kesenjangan penggunaan/akses internet dari pulau Jawa dan pulau-pulau lain di Indonesia. Kita bisa lihat kesenjangan ini dari angka

pengguna internet di Pulau Jawa menyentuh 52 Juta jiwa sedangkan di wilayah Kalimantan dan Irian Jaya masih dikisaran angka 4 sampai dengan 5 juta jiwa pengguna internet. Ini berarti kesenjangan pengguna internet di pulau pusat pemerintahan yaitu Jawa dan Bali jika dibandingkan dengan Kalimantan, Maluku serta Irian Jaya adalah 1:10 sehingga perbandingan ini mengisyaratkan besaran kesenjangan digital yang terjadi di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengakui bahwa Indonesia secara keseluruhan memang belum bisa menyamai negara-negara tetangga yang menduduki urutan teratas soal kecepatan internet seluler. Namun, dia menekankan bahwa hal itu terjadi lantaran kualitas akses internet di Tanah Air memang "jomplang" alias belum merata dari Sabang sampai Merauke. Apabila pengamatan dilakukan secara lebih spesifik ke kota-kota tertentu di Indonesia, maka bisa dilihat bahwa sebenarnya Indonesia tak terlalu tertinggal. Dari data OpenSignal memperlihatkan bahwa adanya kesenjangan yang lebar antar-wilayah di Indonesia terjadi di daerah Papua dan Maluku. Kesenjangan ini misalnya seperti kecepatan *download* hanya berkisar di angka 200-300 Kbps atau jauh lebih rendah dibandingkan wilayah Jawa yang mencatat rata-rata 3,5 Mbps (3.500 Kbps), apalagi Jakarta yang sebesar 7 Mbps. Dengan kata lain, warga Jakarta menikmati kecepatan internet 23 kali hingga 25 kali lebih tinggi dibandingkan dua wilayah di Indonesia Timur tersebut. (Yusuf 2016) Bukan hanya perbedaan kecepatan yang terjadi antara wilayah pulau Jawa dengan Irian Jaya atau Maluku, tetapi biaya akses internet di

pulau Jawa jauh lebih murah dibandingkan biaya akses internet di Irian Jaya, hal ini terkait dengan mahalnya biaya perawatan serta mahalnya infrastruktur di sana.

Selain kesenjangan internet yang terjadi di wilayah pulau Jawa dan Pulau Maluku serta Irian Jaya, menurut Indonesia Netizen Survey ada sekitar 83.4% pengguna internet di Indonesia lebih banyak berdomisili di wilayah urban yaitu di wilayah-wilayah perkotaan yang menjadi pusat pemerintahan. Secara tidak langsung data ini menggambarkan tidak meratanya pengembangan infrastruktur internet di Indonesia dan ketersediaan layanan sambungan internet yang sama di setiap daerah di Indonesia padahal memiliki akses internet yang dapat diandalkan di setiap daerah termasuk daerah pedesaan juga telah diidentifikasi sebagai faktor kunci untuk pembangunan. (Marius and Sapto 2015, 2) Dengan demikian maka ketidakmerataan akses internet antara wilayah *core* (kota) atau dengan wilayah *periphery* (pinggiran) tentu saja membawa dampak timpangnya pembangunan antara daerah perkotaan serta pedesaan.

Berkaitan dengan ketimpangan yang terjadi di perkotaan dan pedesaan tersebut maka pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 96 tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019 pemerintah menargetkan 30% populasi di perkotaan bisa menikmati internet *broadband* pada tahun 2019. Sementara di pedesaan, target penetrasi *broadband* akan mencapai 6%. Dari rencana pembangunan ini pemerintah mengharapkan harga layanan *broadband* dapat mencapai 5% dari total pendapatan per kapita. (Marius and Sapto 2015, 2) Dengan langkah tersebut maka harapan pemerintah terhadap ketimpangan digital

yang terjadi di Indonesia bisa teratasi atau minimal meminimalisir nilai dari ketimpangan yang terjadi antara pulau satu dengan pulau yang lain.

Dampak Ketimpangan Digital Terhadap Rural Development

Dengan kesenjangan digital yang terjadi antara wilayah perkotaan dan wilayah pinggiran maka semakin menambah jarak (GAP) kemajuan pembangunan antara wilayah kota dan wilayah pinggiran karena internet atau dunia digital merupakan pintu utama dalam rangka mempercepat laju pembangunan suatu daerah. Kalau kita melihat lebih jauh permasalahan yang dihadapi oleh wilayah pedesaan (rural) adalah masih banyaknya perangkat desa atau penduduk desa yang memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang rendah, dan ini bertolak belakang dengan prasyarat diterimanya perkembangan teknologi informasi yang mensyaratkan majunya SDM sebagai kunci utamanya.

Selama ini, tampak perjalanan pembangunan daerah masih didominasi oleh strategi yang menempatkan pembangunan masyarakat desa pada posisi setelah pembangunan Kota (kelurahan). Padahal sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di daerah pedesaan yang pada umumnya taraf hidup mereka masih rendah. (Mulyadi 2009, 1) Prioritas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ini yang selanjutnya menjadikan desa pinggiran semakin terpinggirkan dengan rusaknya akses jalan atau informasi menuju desa tersebut atau minimnya sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah di desa pinggiran. Dominasi pembangunan wilayah perkotaan inilah telah menciptakan kesenjangan antara wilayah kota dan wilayah desa.

Kesenjangan yang terjadi antara keduanya bukan hanya pembangunan dalam bentuk fisik (sarana prasarana) saja tetapi juga pembangunan SDM seperti tersedianya sekolahan yang memadai serta sektor-sektor ekonomi seperti tersedianya pasar atau angkutan umum. Tidak jarang, perbedaan kesenjangan antara kota dan desa yang semakin jauh ini juga telah memberikan corak khusus terhadap budaya dari keduanya.

Menurut Bambang Prakoso, kecenderungan stigma yang melekat pada masyarakat pedesaan adalah identik dengan sikap yang kolot dan tradisional. Terjadinya keterbelakangan sosial masyarakat desa dalam pembangunan dinisbatkan karena sulitnya masyarakat desa menerima budaya modernisasi, sulitnya untuk menerima teknologi baru, malas, tidak memiliki motivasi yang kuat untuk berubah, merasa cukup puas dengan pemenuhan kebutuhan subsistem, serta budaya *shared provety* (berbagi kemiskinan bersama). (Mahardhani 2014, 42-43) Masih kakunya penduduk desa dengan aturan-aturan adat serta sulitnya menerima modernisasi ini maka menjadi penghambat utama sebuah desa untuk bisa menjadi maju dalam pembangunan. Kamaluddin (1983) menyebutkan beberapa sikap tradisional dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan keperluan pembangunan dan modernisasi. Di antaranya adalah : (Alhada 2012)

1. Sikap lambat menerima perubahan atau hal-hal yang baru sungguhpun akan menguntungkan mereka.
2. Sikap lebih suka mencari jalan yang paling mudah dan cepat mendatangkan hasil sungguhpun tidak begitu besar, sebaliknya kurang berani memikul resiko pada usaha-usaha yang kemungkinan

keuntungannya lebih besar dan sifatnya jangka panjang.

3. Sikap kurang bertanggung jawab dalam tugas pekerjaan serta mudah untuk tidak menepati janji dalam hubungan-hubungan ekonomi.

Menurut Wilbert Moore, konsep modernisasi ialah suatu transformasi secara menyeluruh masyarakat tradisional atau masyarakat pramodern menjadi masyarakat yang corak teknologi serta organisasi sosialnya akan mengikuti negara-negara yang maju dari segi ekonomi dan stabil dari segi politik. (Long 1987, 12-13) Di Indonesia sendiri terdapat tiga tingkat kematangan masyarakat Desa yaitu: (Mulyadi 2009, 117)

1. *Masyarakat dengan kematangan rendah.* Ciri kelompok ini adalah mereka tidak mau mengerjakan sesuatu karena tidak mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Menghadapi situasi seperti ini, tipe kepemimpinan yang lebih berhasil adalah gaya kepemimpinan otoriter (bersifat memberi arahan atau pedoman agar orang yang dipimpin menjadi tahu dan mau bekerja)
2. *Masyarakat dengan tingkat kematangan menengah.* Cirinya adalah masyarakat mau mengerjakan sesuatu tetapi tidak mengetahui cara mengerjakannya. Tipe kepemimpinan yang cocok dengan kondisi seperti ini adalah menggabungkan unsur otoriter dengan demokratis, artinya seorang pemimpin harus bisa membedakan kapan saatnya memberikan perintah dan kapan saatnya untuk memberikan ruang terhadap gagasan-gagasan yang muncul dari masyarakat.

3. Tipe masyarakat dengan tingkat kematangan tinggi. Cirinya adalah mau mengerjakan sesuatu dan tahu bagaimana cara mengerjakannya. Terhadap situasi seperti ini, tipe kepemimpinan yang cocok adalah berifat demokratis.

Perubahan Arah Paradigma *Rural Development*

Cara pandang kita terhadap desa adalah sebagai “negara kecil” dan bukan sebagai kampung halaman, pemukiman penduduk, perkumpulan komunitas, pemerintahan terendah dan wilayah administrative semata. Di desa, orang terikat secara sesiomotrik dengan masyarakat, institusi lokal dan pemerintahan desa. Selama ini pemerintah menciptakan desa sebagai pemerintahan semu (*pseudo government*) dimana posisi desa tidak jelas apakah sebagai pemerintahan atau sebagai komunitas masyarakat. Pemerintahan semu ini tergambar dari banyaknya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh desa dan sedikit sekali kewenangan yang dimiliki. Karena itu, pemerintahan desa bukanlah entitas yang menyatu secara kolektif seperti kesatuan masyarakat hukum, tetapi sebagai dua aktor yang saling berhadap-hadapan. (Eko, et al. 2014, 16)

Jika kita lihat lebih jauh dari berbagai literatur teori pembangunan, didalamnya terdapat istilah pembangunan desa atau yang sering disebut sebagai *rural development* (pembangunan pedesaan). Perbedaan yang mencolok dari pola pembangunan desa yaitu pada paradigma lama cenderung bersifat *state centric* (otokratis, *top down*, sentralistik, hierarkis, dan juga sektoral) sedangkan pada paradigma baru lebih condong kepada rekognisi dan subsidiaritas yang bersifat

society centric. Jika kita lihat dari sisi perkembangan teknologi informasi, didalam paradigma lama masih cenderung mengandalkan terjadinya transfer teknologi dari negara maju sedangkan pada paradigma baru cenderung menghargai kearifan dan teknologi lokal serta sudah mulai melakukan upaya pengembangan teknologi secara partisipatoris. (Eko, et al. 2014, 36-37) Dengan memasukkan muatan lokal yang masih dipegang teguh oleh desa maka harapan utama dalam pembangunan pedesaan adalah masih terjaganya budaya atau corak yang dimiliki oleh desa. Corak di setiap desa terutama di Indonesia tentunya berbeda-beda sesuai kebudayaan yang dimiliki di setiap desa, dan corak kebudayaan ini tentunya menjadi nilai lebih bagi pembangunan di pedesaan.

Di dalam isi Undang-Undang Desa yang termuat dalam UU No. 6 Tahun 2014, salah satu faktor penentu pembangunan desa adalah sistem informasi desa. Lebih jauh dalam UU Desa ini menjelaskan bahwa sistem informasi yang dimaksud untuk membangun transparansi, akses masyarakat melalui *website* desa, akses pasar untuk mempermudah pergerakan ekonomi dari hasil komoditi desa, serta membangun sistem terpadu terkait dengan data kependudukan dalam upaya anti *trafficking*. (desa 2014) Di dalam cita-cita kabinet kerja Joko Widodo mengembangkan “Tri Sakti” sebagai modal awal untuk memulai pembangunan dari sektor terendah, yaitu desa. Tri Sakti Nawacita Kabinet Kerja Joko Widodo memuat tiga hal yaitu, desa yang berdaulat dalam politik, berdaya dalam ekonomi, serta berkepribadian dalam budaya. (Kurniawan 2015, 13)

Teknologi informasi yang masuk ke dalam desa tidak selamanya berdampak

positif bagi pembangunan desa, tetapi terkadang masuknya teknologi informasi ini mengakibatkan banyaknya penambahan jumlah penduduk yang mengganggu, transformasi yang tidak jelas, dan pola komunikasi yang sejalan dengan perubahan komunitas di desa. Kesemuanya itu merupakan inovasi, baik itu hasil penemuan dalam berpikir atau penemuan yang dapat menimbulkan difusi atau integrasi. Selain itu, terjadi juga peristiwa-peristiwa perubahan kultural yang meliputi “*cultural lag*”, “*cultural survival*”, “*cultural conflict*” dan “*cultural shock*”. Pergeseran nilai tradisional ke nilai modern masyarakat modern dengan nilai dan tujuan ekonomi yang lebih menonjol cenderung memandang sumberdaya pedesaan sebagai suatu komoditas yang secara ekonomi dapat meningkatkan nilai finansial bagi kelompok tertentu, di mana produktivitas dalam rentang waktu tertentu merupakan pertimbangan utama. Sebaliknya masyarakat tradisional dan para industri memandang sumber daya yang sama sebagai milik ulayat yang harus dijaga kelestariannya untuk kepentingan jangka panjang. Bagi mereka aspek pemerataan lebih penting dari produktivitas. (Alhada 2012)

Beralih dari dampak negatif yang dihasilkan oleh masuknya teknologi informasi, tujuan utama dari sistem informasi sendiri adalah menghasilkan informasi yang berguna bagi pemakainya. Data yang diolah di dalam sistem informasi tidak akan berguna jika tidak memiliki tiga pilar, yaitu tepat kepada orangnya atau relevan (*relevance*), tepat waktu (*timeliness*), dan memiliki tingkat akurasi tinggi (*accurate*). (Jogiyanto 2005, 36-37) Lebih lanjut menurut Wahyono, faktor yang mempengaruhi sistem informasi antara lain, faktor metode

kuantitatif yang digunakan, faktor penggunaan komputer sebagai alat bantu, aktor Sumber daya manusia. (Wahyono 2004, 24-25) Dengan kata lain, tidak ada salahnya pemerintah membuat kebijakan pemerataan teknologi informasi sampai di pelosok-pelosok desa dengan tetap menjaga kearifan lokal sebagai nilai lebih dari sebuah desa. Sudah saatnya desa di Indonesia tidak terkurung oleh keterbatasan informasi komunikasi, dan sudah saatnya desa di Indonesia bisa bersaing di tingkat global sehingga menjadi desa global.

PENUTUP

Kesimpulan

Masuknya era globalisasi ditandai dengan keterbukaan akses informasi dan transfer teknologi dari negara maju kepada negara sedang berkembang seperti Indonesia. Tidak selamanya globalisasi membawa dampak yang baik bagi negara Indonesia karena luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari gugusan pulau yang menyebabkan tidak terjadinya pemerataan baik terhadap akses informasi maupun dalam pembangunan. Pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi ini selanjutnya berperan penting dalam mendorong perkembangan pembangunan di suatu negara. Kesenjangan digital yang terjadi di Indonesia dipicu dari luasnya wilayah negara ini serta struktur negara Indonesia yang terbentuk dari gugusan-gugusan pulau-pulau. Kondisi geografis negara Indonesia ini pulau pusat pemerintahan dengan pulau-pulau pinggiran. Selain kesenjangan digital yang terjadi antar pulau, kesenjangan digital di Indonesia ini nyatanya juga terjadi antara wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan (pinggiran). Kesenjangan digital antara wilayah kota dan wilayah pedesaan ini

pada akhirnya mengakibatkan terjadinya ketimpangan yang tinggi antara pembangunan perkotaan dan pembangunan pedesaan.

Selain karena kesenjangan digital yang terjadi, ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan (*rural development*) juga terkendala dengan adanya aturan-aturan adat yang engikat suatu desa serta budaya-budaya tradisional yang menolak diterimanya paham-paham atau teknologi-teknologi baru hasil dari globalisasi. Untuk menghindari ketimbangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, tentunya harus dilakukan perubahan paradigma pembangunan pedesaan yang menggabungkan antara kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan kearifan lokal dimana keduanya akan saling menguatkan satu sama lain. Teknologi informasi dan komunikasi akan membuka akses pengetahuan dan kerjasama baik dengan wilayah lain ataupun dari negara lain, sedangkan kearifan lokal akan berfungsi sebagai ciri dari desa tersebut dengan desa yang lain atau bisa dikatakan sebagai corak alamiah dari suatu desa. Dengan melakukan perubahan paradigma *rural development* maka bisa dipastikan pembangunan di Indonesia akan menjadi lebih merata serta terciptanya desa global bercorak kearifan lokal.

Saran

Untuk pemerataan pembangunan di Indonesia, sebaiknya pemerintah segera menyiapkan langkah strategis yang berkaitan dengan pemerataan teknologi informasi dan komunikasi. Kalau kita lihat sekarang perluasan jaringan teknologi informasi dan komunikasi masih mengandalkan BTS (tower) pemancar

sebagai perluasan jaringan, mungkin kedepan pemerintah harus membuka langkah baru dengan memberikan akses informasi komunikasi langsung melalui satelit untuk daerah-daerah terpencil. Dengan demikian, harapan kedepan adalah tidak terjadi lagi kesenjangan digital di Indonesia sehingga pembangunan akan lebih merata baik di pulau pusat pemerintahan atau pulau terpencil atau antara kota dan pedesaan.

Selain saran di atas, muatan lokal atau kearifan lokal tiap-tiap desa atau wilayah harus terus dijaga sebagai ciri khas suatu daerah sehingga bisa menjadikan nilai lebih dibandingkan dengan daerah yang lain. Jika kesenjangan digital bisa teratasi dan dikuatkan dengan kearifan lokal maka tentu saja pembangunan yang bercorak kemajuan teknologi informasi dan komunikasi bercorak ke-Indonesiaan bisa terbangun.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhada. "Studi Kasus Dampak Masuknya Teknologi Modern Pada Masyarakat." <http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/>. November 08, 2012. http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-64108-Esay-Studi%20Kasus%20Dampak%20Masuknya%20Teknologi%20Modern%20Pada%20Masyarakat%20Desa.html (accessed Juni 18, 2016).
- Appadurai, Arjun. "The Right To Research." *Globalisation, Societies and Education* (The New School), 2006: 167 - 177.
- Battersby, Paul, and Joseph M. Siracusa. *Globalization and Human Security*. United States of America: Royman and Little Field Publisher, 2009.
- desa, revolusi. <http://revolusidesa.com/>. Agustus 8, 2014.
- <http://revolusidesa.com/uudes> (accessed September 10, 2015).
- Eko, Sutiri, et al. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014.
- Hartanto, Adrian. "Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Berdampak pada Berbagai Konteks." <http://komunikasi.us>. Mei 17, 2014. <http://komunikasi.us/index.php/course/perkembangan-teknologi-komunikasi/1668-perkembangan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-berdampak-pada-berbagai-konteks> (accessed Juni 18, 2016).
- Hoffman, John. *A Glossary of Political Theory*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007.
- Jogiyanto. *Sistem Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi Press, 2005.
- kominfo. "Pengguna Internet Didominasi Penduduk Perkotaan." <https://kominfo.go.id>. Maret 30, 2015. https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3538/Pengguna+Internet+Didominasi+Penduduk+Perkotaan/0/sorotan_media (accessed Juni 17, 2016).
- Kurniawan, Borni. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Long, Norman. *Sosiologi Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: PT. Melton Putra, 1987.
- Mahardhani, Ardhana Januar. *Strategi Pembangunan Desa*. Ponorogo: UNMUH Ponorogo Press, 2014.
- Mareta, Anastasia. "Dampak Positif dan Negatif Teknologi Komunikasi dan Informasi." <http://komunikasi.us>. Mei 12, 2014. <http://komunikasi.us/index.php/course/perkembangan-teknologi-komunikasi/1579-dampak-positif->

- dan-negatif-perkembangan-teknologi-komunikasi-dan-informasi (accessed Juni 18, 2016).
- Marius, Parlindungan, and Spto. *Profil Pengguna Internet Indonesia 2014*. Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2015.
- Mulyadi, Mohammad. *Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Masyarakat Desa*. Tangerang Selatan: Nadi Pustaka, 2009.
- Nasution, Robby Darwis. "MENEROPONG MASA DEPAN PENDIDIKAN DI INDONESIA (Penerapan Virtual Learning di Indonesia)." *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN*. Ponorogo: FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2015. 489.
- Pamungkas, Cahyo. "Global Village dan Globalisasi dalam Konteks ke-Indonesiaan." *Jurnal Global dan Strategis*, 2015: 245-261.
- Simarmata, Janner. *Pengenalan Teknologi Komputer dan Informasi*. Yogyakarta: Andi Press, 2005.
- Wahyono, Teguh. *Sistem Informasi : Konsep Dasar, Analisis desain dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu Press, 2004.
- Walkosz, Barbara J., Tessa Jolls, and Mary Ann Sund. "Global/Local: Media Literacy for the Global Village." *International Media Literacy Research Forum*. London: OfCom, 2008. 1-24.
- Winarno, Budi. *Globalisasi dan Krisis Demokrasi*. Jakarta: PT. Buku Kita, 2007.
- Yusuf, Oik. "Internet Indonesia Jomplang, Palapa Ring yang Mangkrak 11 Tahun Dihidupkan." <http://tekno.kompas.com/>. Maret 18, 2016. <http://tekno.kompas.com/read/2016/03/18/20330017/Internet.Indonesia.Jomplang.Palapa.Ring.yang.Mangkrak.11.Tahun.Dihidupkan> (accessed Juni 18, 2016).